

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Sumber Lain

- Hadi, N., & Sriyani, S. (2021). Penerapan Psap Nomor 07 Tentang Akuntansi Aset Tetap Pada Kantor Kepolisian Resor Kota Lubuklinggau. *Journal Publicuho*, 4(3), 961. <https://doi.org/10.35817/jpu.v4i3.20937>
- Pinatik, S., Ilat, V., & Kolinug, M. (2015). Analisis Pengelolaan Aset Tetap Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Tomohon. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 3(1), 818–830. <https://doi.org/10.35794/emba.v3i1.7556>
- Setiadi. (2015). PENERAPAN METODE PENYUSUTAN ASET TETAP (Studi kasus pada PT CHANDRA SAKTI UTAMA LEASING JAKARTA). *Jurnal Bisnis & Akuntansi Unsurya*, 5(2), 1–11. <https://doi.org/10.35968/jbau.v5i2.434>

Paturan Perundang-undangan

- Komite Standar Akuntansi Pemerintah. (2010). *Standar Akuntansi Pemerintahan Pernyataan Nomor 7 Tentang Akuntansi Aset Tetap*. Jakarta.
- Pemerintah Indonesia. (2010). *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah*. Jakarta.
- Kementerian Keuangan. (2013). *Keputusan Menteri Keuangan 295/KMK.06/2019 tentang Tabel Masa Pemanfaatan Barang Milik Negara*. Jakarta.
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. (2014). *Buletin Teknis No. 15 Tentang Akuntansi Aset Tetap Berbasis Akrua*. Jakarta.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Menteri Keuangan 181/PMK.05/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara*. Jakarta.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Menteri Keuangan 234/PMK.05/2020 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat*. Jakarta.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Menteri Keuangan 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat*. Jakarta.